



SUMBER BERITA

KAMIS, 04 OKTOBER 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Praperadilan Ketua DPRD Seluma Berpotensi Gugur

Berkas dan Tsk Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

RBI, BENGKULU - Humas Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Suparman SH, MH menyatakan hingga saat ini tahapan proses persidangan Praperadilan (prapid) tersangka Dr Husni Tamrin SH, MH (ketua DPRD Seluma) terus bergulir. Dan jadwal sidang perdana Prapid tersebut sudah ditetapkan yaitu minggu depan. Sementara berkas perkara dan tersangka, Husni Tamrin sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tais Kabupaten Seluma, kemarin Rabu 3 Oktober 2018 untuk ditelaah. "Kalau berkas dan tersangkanya sudah dilimpahkan ke Jaksa tidak ada masalah dan tidak menghambat proses persidangan Praperadilan. Silakan saja dari penyidik melakukan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa, pelimpahan tersebut tidak mengganggu proses praperadilan," ungkap Suparman.

Suparman menegaskan, untuk ukurannya jika berkas perkara dan tersangka sudah dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Kemudian perkaranya mulai diperiksa, maka dapat mempengaruhi proses persidangan praperadilannya. Tetapi kalau belum dilimpahkan dari JPU ke PN proses praperadilannya tetap berlanjut.

"Kalau limpahan dari penyidik ke Jaksa tidak mempengaruhi proses praperadilan. Namun apabila JPU sudah melimpahkan berkas perkara ke PN dan sudah diperiksa oleh hakim, maka otomatis permohonan praperadilannya gugur, itu sudah otomatis karena hakim sudah masuk ke pokok perkara," pungkas Suparman. Untuk diketahui, Husni Tamrin resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh tim penyidik Reskrimsus Polda Bengkulu pada Selasa 28 Agustus 2018 lalu. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan lantaran diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas PU Kabupaten Seluma Tahun Anggaran (TA) 2013 dengan nilai proyek Rp 1,2 Miliar. Sesuai dengan hasil audit pekerjaan tersebut diduga telah merugikan negara Rp 400 Juta lebih. (ide)